

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang ditandai dengan tidak ada batasan (*barrier*) antar negara sekarang ini menuntut adanya sebuah kesepakatan dan perjanjian antar negara. Hal ini bisa kita lihat dengan munculnya berbagai asosiasi/ organisasi pada tingkat regional maupun international. Mulai ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), AFTA (*Asian Free Trade Area*), (ASEAN- Jepang dan China) dan (MEE) Masyarakat Ekonomi Eropa. Hal ini memperlihatkan bahwa isu globalisasi menjadi bahasan bersama bagi beberapa negara yang memiliki satu atau lebih kesamaan dalam konteks geografi, budaya, sosial dan kepentingan. Adanya sebuah kesadaran bersama untuk menyikapi globalisasi merupakan cerminan globalisasi memiliki eksese positif dan negatif. Globalisasi akan menjadi mesin otomatis untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara maju yang sudah memiliki tingkat kompetisi dan kualitas standar yang bagus. Tetapi dalam waktu yang sama akan menjadi bumerang bagi negara berkembang yang hanya mampu menjadi obyek dalam arus globalisasi.

Kata globalisasi sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris *globalization* yang artinya menjadikan sesuatu mendunia atau bersifat international, yakni menjadikannya dari terbatas menjadi tidak terbatas (Qaradhawi:2001). Terbatas dalam arti dibatasi oleh batas-batas geografis. Sedang tidak terbatas adalah dunia. Istilah *globalization* muncul pertama kali di Amerika Serikat berkenaan dengan ekonomi yang artinya adalah megeneralisir

sesuatu dan memperluas jangkauan hingga ke seluruh tempat. Menurut Qaradhawi (2001) makna dan cakupan tentang globalisasi adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan batas kenasionalan dalam bidang ekonomi (perdagangan) dan membiarkan segala sesuatu bebas melintas dunia dan menembus level internasional sehingga terancamlah nasib suatu Bangsa atau Negara.
2. Seruan kepada globalisasi jika datang dari suatu Negara atau suatu kelompok, maka maksudnya adalah mensosialisasikan pola atau sistem tertentu yang dimiliki oleh suatu Negara atau kelompok hingga menembus seluruh dunia. Sehingga bisa disimpulkan jika yang menjadi sponsor utama dari istilah globalisasi adalah Amerika Serikat maka maknanya menjadi mensosialisasikan pola dan sistem Amerika Serikat kepada semua Negara di dunia.

Berbeda dengan konsep *'alamiyah* (universal) yang ditawarkan Islam. *'Alamiyah* yang dibawa Islam datang selain untuk menghormati umat manusia semuanya, juga menyatakan bahwa manusia itu sama (Qaradhawi:2001). Tidak ada diskriminasi dalam hal kedudukan dan asalnya yang mulia sebagai manusia, serta dalam tugas dan tanggung jawab. Mereka semua adalah sama dalam penghambaan kepada Allah SWT dan dalam hal statusnya sebagai keturunan Adam, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallahu'Alai wa Sallam, di hadapan lautan manusia pada Haji Wada':

“Wahai segenap manusia, ketahuilah bahwa Rabb-Mu adalah satu, bapakmu satu, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas non-arab, juga tidak ada keistimewaan bagi non-arab atas orang arab, tidak pula yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam maupun

sebaliknya orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan taqwa...”

Konsep ‘alamin sendiri diambil dari Al Qur’anul karim

“...Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam...” (Al Anbiyaa:21)

Adanya unsur kesetaraan dalam interaksi semua manusia di muka bumi.

Sedangkan globalisasi sekarang yang terjadi adalah bukan bermakna kerja sama dan saling membantu antara dua orang saudara sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, atau antara dua orang mitra seperti diharapkan oleh orang-orang merdeka dan terhormat di seluruh dunia, tetapi globalisasi bermakna seorang tuan mempergauli hamba sahaya, raksasa memperlakukan makhluk kecil atau si kuat menindas si lemah (Qaradhawi:2001).

Globalisasi sekarang sudah memasuki pada sektor kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan ketahanan nasional suatu negara. Globalisasi dalam bidang ekonomi-akuntansi misalnya adanya keterpautan antara standar akuntansi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia dengan standar internasional yang dimotori oleh negara-negara maju. Maka istilah yang muncul diantaranya gerakan harmonisasi, konvergensi atau internasionalisasi. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi dan konvergensi standar akuntansi ini antara lain adalah IASB (*International Accounting Standard Board*), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi

perdagangan, serta IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*).

Ketika gerakan harmonisasi, konvergensi atau internasionalisasi standar akuntansi menjadi komoditas yang ditawarkan oleh beberapa negara pelopor maka secara logis memiliki sebuah konsekuensi. Ke semuanya itu seakan menjadi sebuah keniscayaan dengan dalih perdagangan internasional yang membutuhkan “keseragaman” dalam perlakuan akuntansi. Memang ada sisi positif dan negatif dari harmonisasi, konvergensi atau internasionalisasi itu sendiri. Tetapi faktor yang tidak mudah untuk disederhanakan dalam prosesnya adalah adanya nilai-nilai lokal tiap negara yang menjadi warna tersendiri dalam mengembangkan bentuk akuntansinya. Nilai lokal bisa berarti budaya, keyakinan, bahasa dan sejarah. Di dalam di Al Qur’an disebutkan:

“Wahai segenap manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari pria dan wanita dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa.” (Al-Hujurat:13).

Sekalipun ayat ini menjelaskan persamaan secara umum antara manusia, namun Al Qur’an tidak melenyapkan keistimewahan-keistimewaan yang dimiliki tiap-tiap bangsa, dimana pada ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan mereka berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Ada sebuah logika ketuhanan yang sangat humanis bahwa keberagaman adalah sebuah rahmat. Seakan Allah SWT mengajak untuk menerima keberagaman yang ada sebagai hal yang bersifat *given*.

Sementara itu akuntansi, yang merupakan hasil daya cipta manusia,

tercipta sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat, dipercayai tercipta melalui proses interaksi sosial (Hines:1989) maka akuntansi juga dipercayai dibentuk oleh lingkungannya seperti lingkungan politik, hukum, ekonomi dan sosial (Pramuka:1990). Hal ini sangatlah jelas karena dalam proses interaksi sosial tentunya akan sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat terkait seperti nilai-nilai yang dipegang, persepsi ataupun hal lainnya. Dalam dengan hal ini Tricker (1978:8) menegaskan:

“...accounting is dependent on the ideology and mores of society. It is not value free. It is a child of its culture. Any claim to report objective facts has to be set into the context of the beliefs of that particular culture”.

Pandangan di atas menunjukkan betapa lingkungan, salah satunya adalah budaya, memiliki peran yang krusial dalam penciptaan bangunan akuntansi bahkan akuntansi dapat dikatakan sebagai sebuah produk dari budaya. Namun satu pandangan yang menarik bahwa akuntansi (diwakili dengan sistem pembukuan berpasangan) juga dipercaya mempengaruhi dan membentuk lingkungannya. Pendapat seperti ini didukung oleh beberapa pakar dan cukup mewarnai serta memperkaya wacana *accounting thought*. Sombart, salah seorang dari pengusung pandangan ini, berpendapat bahwa:

One cannot imagine what capitalism would be without double-entry bookkeeping; the two phenomena are connected as intimately as form and content. One cannot say whether capitalism created double entry bookkeeping as a tool in its expansion; or perhaps, conversely, double entry bookkeeping created capitalism (Belkaoui, 1992:12).

Sombart berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan apakah kapitalisme yang melahirkan sistem pembukuan berpasangan ataukah sistem pembukuan berpasangan itulah yang menciptakan kapitalisme.

Mathews dan Parera (1993:15) kemudian memperkuat kedua pandangan di atas dengan berpendapat bahwa:

Although the conventional view is that accounting is socially constructed as a result of social, economic and political events, there are alternative approaches which suggest that accounting may be socially constructing.

Pendapat Mathews dan Perera (1993:15) ini menangkap suatu realitas dimana akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungannya namun juga membentuk lingkungannya.

Bentuk akuntansi sebagai produk budaya dalam perkembangannya dipengaruhi oleh ideologi dan moral masyarakat dimana akuntansi itu dipraktikkan (Triyuwono:1997; dan Condro:1998). Dalam hal ini Morgan (1988:484) seperti yang dikutip oleh Triyuwono (1997:6), menambahkan bahwa akuntansi selain terbentuk dari pengaruh lingkungan, juga secara aktif menebarkan kekuatan (pengaruh) untuk mempengaruhi dan membentuk lingkungan serta realitas dimana ia hidup dan di praktekkan. Sehingga nilai-nilai yang melekat dalam akuntansi tersebut merupakan pencerminan balutan ideologi yang mendasari konsep-konsep yang dipakainya. Triyuwono (1996) memperkuat keberadaan kondisi ini dengan mengatakan:

Akuntansi sebagaimana dikenal dalam masyarakat umum, adalah sebuah media yang disediakan untuk memberikan informasi dari sebuah entitas bisnis bagi pihak-pihak dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi...(dimana) akuntansi mampu memberikan

kontribusi yang besar bagi perkembangan sistem ekonomi kapitalis (Triyuwono, 1996:44).

Maka tidaklah mengherankan jika konsep akuntansi konvensional sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan kaum pemilik modal (*shareholder*) dalam perusahaan tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang memberikan kontribusinya dalam mengembangkan perusahaan, di samping mengacuhkan aspek lingkungan maupun aspek sosial yang ada di sekitar mereka. Dalam skala makro maka pemilik modal itu akan menjelma sebagai negara yang memiliki otoritas lebih terhadap negara lainnya. Itulah awal dari sebuah neokolonialisme, khususnya dalam hal konvergensi standar akuntansi.

Harmonisasi dan konvergensi akan standar akuntansi yang harus dijalankan banyak negara dengan sebuah keseragaman yang memaksa dan tidak mentoleransi keberagaman nilai setiap negara. Sampai saat sekarang ini, Negara Barat masih gencar mempromosikan perlunya harmonisasi yang dilanjutkan dengan konvergensi standar akuntansi. Tujuan utama upaya tersebut adalah untuk meningkatkan daya banding (*comparability*) laporan keuangan terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan jika pihak Barat (Amerika Serikat) membentuk suatu badan yang dinamakan *International Accounting Standard Committee* (IASC), yang sekarang berubah namanya menjadi *International Accounting Standard Board* (IASB). Badan ini bertugas menghasilkan standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards-IFRS*). Meskipun keanggotaan badan tersebut melibatkan negara negara berkembang, Negara Barat/kapitalis seperti Amerika, Inggris, Kanada dan Australia tetap mendominasi konsep akuntansi dan standar

akuntansi yang dihasilkan. Akibatnya, standar akuntansi tersebut umumnya didasari pada konsep ekonomi kapitalis yang kemungkinan bertentangan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya negara berkembang dan khususnya ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh Negara-Negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia.

Tentunya proses pengadopsian konsep-konsep akuntansi mainstream itu harus betul-betul melalui pertimbangan pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai kelokalan setiap negara dan bukan sekedar jalan pintas untuk membentuk akuntansi berstandar internasional yang diukur dari aspek kepraktisan saja. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dalam standar akuntansinya. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai dan berlaku di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. PSAK mengalami beberapa kali revisi mulai dari 1974 hingga 2010. Hal ini sebagai konsekuensi dan tuntutan dari perkembangan di dalam dunia bisnis. IAI sebagai motor dan dalang di belakang dari lahirnya PSAK memiliki banyak tarikan, baik tarikan kepentingan nasional maupun internasional. Sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sudah tentu seharusnya IAI mampu menyerap aspirasi dan kepentingan dalam negeri. Meskipun tidak dinafikan juga tarikan mancanegara sangat dominan untuk mewarnai akuntansi Indonesia hingga saat ini. Hal ini bisa masih wajar karena struktur ekonomi (bisnis) Indonesia juga ditopang oleh kekuatan modal mancanegara yang tidak

sedikit. Meskipun pengaruh dunia internasional yang semakin kental, IAI harus tetap memperhatikan dan mewartakan kebutuhan ekonomi dalam negeri sendiri yang tertuang di dalam standar akuntansi. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya adanya standar yang dikhususkan untuk bisnis berbasis syariah, usaha kecil dan menengah. Awalan yang melegakan dan bisa menjadi jawaban atas kerisauan para akademisi atas upaya IAI untuk mengadopsi penuh IFRS sebagai standar akuntansi yang dijalankan di Indonesia.

Hal seperti inilah yang disebut dengan ijtihad dalam masa kekinian (Qaradhawi:2007). Yaitu upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, dimana dulu belum ditemukan dalil dari para ulama tentang masalah tersebut. Kassab (2008) menuliskan pendapat Qaradhawi bahwa ijtihad yang diperlukan sekarang adalah dalam bentuk penelitian yaitu dalam bidang penelitian dan studi hukum Islam,

Di sisi lain, dalih dari upaya konvergensi standar akuntansi yaitu menuju sebuah kondisi yang sangat ideal. Maka sebenarnya standar ideal tersebut juga harus berlandas pada suatu konsep yang ideal. Menurut hemat penulis, justru konsep kesetaraan (*'alamin*) yang diajarkan dalam Islam lah yang harus digunakan dalam proses pengembangan akuntansi (standar akuntansi). Sebagaimana Qaradhawi (1989) menegaskan bahwa Islam (*'alamin*) adalah sebagai agama paripurna yang sudah komprehensif memberikan *rule* dalam segala aspek kehidupan (ekonomi akuntansi). Hal ini sejalan dengan ayat Allah yang berbunyi:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (Al Maidah:3)

Sehingga walaupun ada sisi “kreatifitas” ataupun mengadopsi dalam upaya membuat standar akuntansi maka masih dalam koridor Al Qur’an dan As Sunnah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntansi dengan judul **“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dalam perspektif prinsip ‘Alamin”**

1.2 Perumusan Masalah

Strategi Negara Barat dalam merealisasikan harmonisasi atau konvergensi akuntansi adalah melalui “penyeragaman” standar akuntansi di seluruh dunia. kenyataannya Standar akuntansi yang berlaku di suatu negara merupakan sebuah aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua entitas yang berkepentingan di negara tersebut. Tentunya dalam proses pembuatannya sudah mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatannya. Sehingga sangat logis aturan tersebut untuk diterapkan, tetapi kenyataannya dalam perkembangan akuntansi Indonesia seakan berbanding terbalik. Indonesia telah mengadopsi total (*fully adopted*) standar akuntansi Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan GAAP (*General Accepted Accounting Principle*). Segala hal ini bisa terjadi dengan dalih adanya kesepakatan tentang harmonisasi atau

konvergensi akuntansi. Apapun alasan yang dijadikan “pembenaran” dalam menentukan sebuah standar akuntansi suatu negara adalah sah saja. Tapi segala sesuatu keputusan terlebih tentang suatu standar akuntansi maka akan mengakibatkan rentetan konsekuensi yang rumit.

Pembuatan standar akuntansi adalah salah satu agenda globalisasi di bidang ekonomi yang dimotori oleh Negara Barat dan lembaga-lembaga pendukungnya. Sebagaimana pendapat Qaradhawi (1989) bahwa:

...globalisasi memiliki media dan perangkat yang mampu memberi pengaruh dan penekanan untuk mencapai tujuannya di Negara-negara di dunia, di antara media itu adalah Bank Dunia, IMF, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berikut cabang-cabangnya dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta perusahaan-perusahaan raksasa yang beragam di banyak tempat.

Sehingga pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

Bagaimana PSAK Indonesia dalam perspektif prinsip *'alamin* ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terfokus maka penulis memberi batasan masalah ini sebagai berikut:

1. PSAK yang dimaksud adalah tiga pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (PSAK Besar, SAK-ETAP, dan PSAK syariah).
2. Prinsip *'alamin* (universalitas) yang dipakai adalah dalam perspektif pemikirannya Yusuf Qaradhawi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Memahami perkembangan standar akuntansi di Indonesia sehingga mengetahui bagaimana ilmu akuntansi selama ini dikembangkan.
2. Bagaimana pandangan Qaradhawi atas kebijakan-kebijakan IAI dalam mengembangkan PSAK di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan keilmuan penulis tentang ilmu sosial dan ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi.
 - b. Meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran ilmu yang didasari oleh syariah (Al Qur'an).
2. Bagi Pembaca
 - a. Memberikan suatu wacana baru tentang perkembangan PSAK di Indonesia
 - b. Menambah wawasan dan khasanah keilmuan pembaca, khususnya tentang PSAK di Indonesia.
3. Bagi Penelitian Lanjutan
 - a. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan.
 - b. Merangsang penelitian-penelitian baru yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai acuan utama dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

